



# Informasi Strategis

**Selasa, 12 Januari 2021**

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat  
Gedung AH Nasution Lt. 14**

**BIDANG DALAM NEGERI**

**MEDIA EXPOSURE**

514 Berita Online Lokal – nasional

4.873 Mention Media Sosial

722 Influencer

**3 DAMPAK**

Rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) berdampak beberapa pihak menghendaki untuk penonaktifan Kapolda Metro Jaya dalam rangka penegakan hukum guna memudahkan penyidikan dalam proses peradilan sesuai rekomendasi dari Komnas Hak Asasi Manusia (HAM)

**Hasil Investigasi Komnas HAM, Dua Oknum Polisi Diduga Eksekutor 4 Anggota FPI**

1

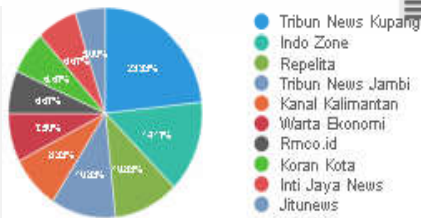
Pada tanggal 10 Januari 2021 Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Hasil investigasi Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) terkait tewasnya empat anggota Front Pembela Islam (FPI). Dengan tegas bahwa Polisi telah melanggar HAM. Petugas dinilai tidak menghindari adanya korban lebih banyak dalam peristiwa tersebut. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap orang yang masih hidup memerintahkan jongkok dan tiarap.

LEVEL ANCAMAN TINGKAT NASIONAL

RENDAH

SEDANG

TINGGI



2

Dugaan pelanggaran HAM dari petugas kepolisian terkait tewasnya empat anggota Front Pembela Islam (FPI) mendapat perhatian publik. Hasil investigasi Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan kasus tersebut telah merekomendasi empat hal yaitu soal pelanggaran HAM dan proses peradilan, penegakan hukum orang yang berada di 2 mobil petugas, pengusutan senjata api, serta penegakan hukum yang akuntabel, obyektif dan transparan. Hasil kerja dan rekomendasi tersebut telah diajukan kepada Presiden. Jika Presiden tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas Ham maka terhadap dua Oknum Polisi yang diduga eksekutor 4 Anggota FPI rentan peradilan HAM Internasional ikut menangani kasus tersebut.

ANALISIS

4

Kemhan bersinergi dengan Menko Polhukam membangun komunikasi intens dengan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) gunaantisipasi peradilan HAM Internasional ikut menangani kasus tewasnya 4 anggota Laskar FPI.

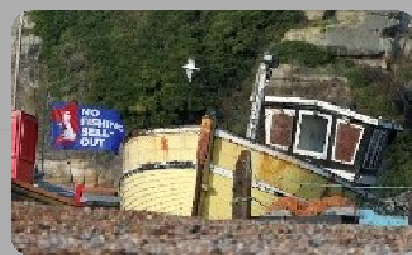
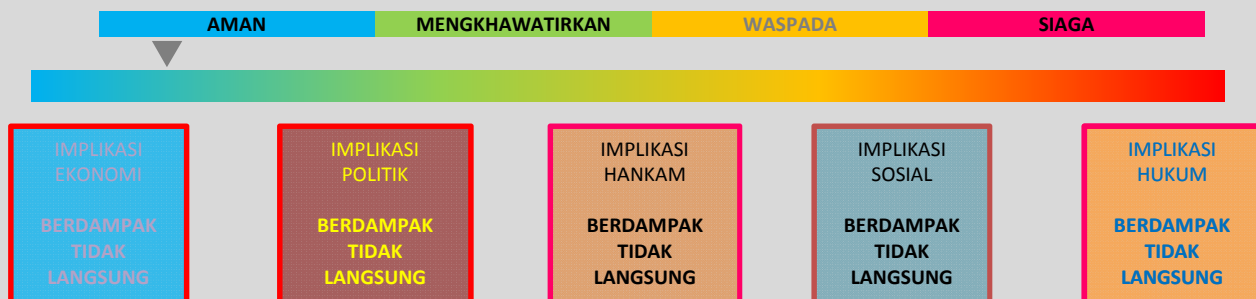
SARAN

1

## FAKTA/DATA Partai Nasional Skotlandia Menuntut Kompensasi Pasca-Brexit

Pada tanggal 10 Januari 2021 Partai Nasional Skotlandia (*Scottish National Party/SNP*) melalui pimpinannya di Parlemen Inggris, Ian Blackford menuntut pemerintahan di bawah Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson untuk membayar kompensasi milyaran poundsterling untuk mengganti kerugian ekonomi Skotlandia yang diakibatkan oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE).

### INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL



2

### ANALISA

1. Tuntutan SNP menandai meningkatnya tekanan internal kepada PM Boris Johnson pasca keluarnya Inggris dari UE. Sejumlah tekanan kepada Pemerintah Inggris dipicu oleh hilangnya privilese ekonomi sebagai anggota UE yang dianggap mempersulit kehidupan warga.
2. Nelayan di Inggris Raya dilaporkan menjadi salah satu entitas yang paling awal terdampak. Nelayan Skotlandia disebutkan tidak dapat lagi menjual hasil tangkapan langsung ke Perancis. Sementara itu komunitas nelayan di Inggris secara umum menunjukkan ketidakpuasan kepada Boris Johnson karena dianggap gagal mewujudkan janji bahwa perairan Inggris akan kembali berada di bawah kendali negara tersebut pasca-Brexit.

3

### DAMPAK

Ketidakpuasan kepada situasi ekonomi di Inggris raya pasca-Brexit berpotensi mendorong segregasi politik, khususnya dengan wacana referendum Skotlandia yang semakin mengemuka.

4

### SARAN

1. Kemhan mendorong Puslitbangstrahan untuk mengkaji dinamika sosial, politik, dan ekonomi dalam negeri Inggris pasca-Brexit serta kemungkinan pengaruhnya ke depan terhadap perubahan arah kebijakan strategis/luar negeri Inggris.
2. Kemhan berkoordinasi dengan Kemlu di perwakilan resmi Pemerintah RI di Inggris untuk mendapatkan informasi terkini tentang situasi sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri Inggris Raya pasca-Brexit dalam rangka memperkirakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kerjasama dengan Inggris.

## Penolakan Masyarakat Guam terhadap penetapan *Ritidian Danger Zone*

1

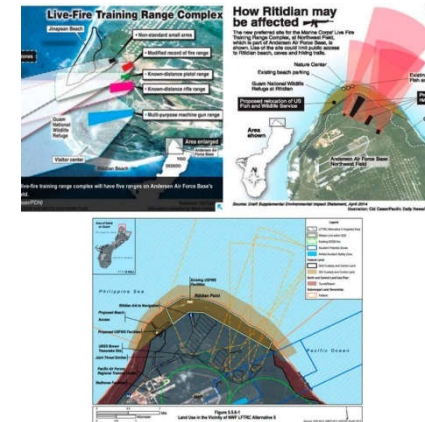
Pada tanggal 11 Januari 2021, Media *Pacific Daily News* melaporkan penolakan masyarakat Guam terhadap ditetapkannya *Ritidian Danger Zone* yang membatasi akses publik ke wilayah tersebut hingga 75% sepanjang tahun ini, karena akan dijadikan kawasan latihan tembak militer AS. Kawasan tersebut memiliki luas 3.660 hektar, meluas ke Samudera Pasifik sekitar 2,8 mil dari pantau utara Guam, di sepanjang Suaka Margasatwa Nasional Guam.



2

ANALISIS

Pembatasan akses oleh militer AS tersebut sebagai upaya memastikan keamanan publik selama kegiatan pelatihan militer. Militer AS pun menyatakan bahwa penduduk dapat mengakses kawasan tersebut ketika tidak digunakan latihan militer. Namun, pembatasan akses untuk penduduk maksimal 75% belum diterima masyarakat setempat. Peristiwa ini sama dengan penolakan masyarakat Okinawa terhadap aktivitas AS yang semakin meningkat disana dan berujung pada penarikan sebagian militer AS dari sana.



### INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

| AMAN                     | MENGKHAWATIRKAN          | WASPADA                  | SIAGA                    |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| IMPLIKASI POLITIK        | IMPLIKASI SOSIAL         | IMPLIKASI EKONOMI        | IMPLIKASI HUKUM          | IMPLIKASI HANKAM         |
| BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG | BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG | BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG | BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG | BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG |

3

DAMPAK

Dengan meningkatnya kehadiran China di kawasan pasifik (dhi. LCS dan Pasifik Selatan), memicu kehadiran militer AS secara besar-besaran di kawasan tersebut. Hal ini akan mengganggu lingkungan di kawasan mengingat kehadiran militer AS tersebut akan merubah tatanan sosial, meskipun secara ekonomi, berpotensi memajukan kawasan melalui pemasukan.

4

SARAN

TNI perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat di perairan Indonesia di beberapa *choke point*, Khususnya di ALKI II dan ALKI III terhadap dampak dari penetapan *Ritidian Danger Zone*.

INFO GLOBAL

## HASIL UJI COBA VAKSIN SINOVAC DILAPORKAN EFEKTIF DI BRAZIL 78 % DAN TURKY 91,25 %

### 1 FAKTA

Pada tanggal 7 Januari 2021 para peneliti di Brasil melaporkan Vaksin Virus Corona yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech asal China dilaporkan 78 persen efektif dalam uji coba tahap akhir di Brasil. Kendati demikian, kurangnya detail data memicu seruan untuk pemaparan data yang lebih transparan. Sebelumnya, Vaksin Virus Corona dari Sinovac dilaporkan efektif 91,25 persen menurut data sementara dari hasil uji coba tahap akhir di Turki.

### 2 ANALISIS

Direktur pusat penelitian biomedis Butantan, mitra penelitian dan produksi Sinovac di Brasil mengatakan hasil rinci sedang diserahkan ke regulator kesehatan Brasil Anvisa. Penyerahan hasil rinci tersebut akan digunakan Anvisa untuk memutuskan penggunaan darurat Vaksin Covid-19 dari Sinovac di Brazil. Selain Brasil, Sebelumnya Vaksin Virus Corona dari Sinovac dilaporkan efektif 91,25 persen menurut data sementara dari hasil uji coba tahap akhir di Turki. Brazil, Turki, Chile, Singapura, Ukraina, Thailand dan Indonesia telah mencapai kesepakatan pasokan Vaksin Covid-19 dari Sinovac tersebut untuk digunakan di negara masing-masing. Namun demikian pemerintah Indonesia perlu melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat tentang keamanan dan efektifitas penggunaan Vaksin CoronaVac tersebut, dengan disertai data pendukung yang dapat membuat masyarakat yakin dan percaya serta tidak ragu untuk menggunakannya.

### 3 DAMPAK



Prosentase keberhasilan penggunaan Vaksin Sinovac di beberapa negara akan berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk tidak ragu melakukan vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah dalam upaya memutus rantai pandemi Covid-19

### 4 SARAN

Kemenhan mendorong Kemenkes untuk lebih mengintensifkan kembali pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang keamanan dan efektifitas penggunaan Vaksin Sinovac